

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini persaingan antarnegara di berbagai bidang sangat ketat. Dalam bidang ekonomi misalnya, adanya perdagangan bebas antar negara yang telah dicantumkan dalam *Asean Free Trade Area (AFTA)* tahun 2003 membuat perdagangan antar negara anggota harus bebas aktif, hal ini berarti setiap negara harus meningkatkan kualitas diberbagai bidang agar mampu bersaing dengan negara lain, begitupun dengan negara Indonesia. Masyarakat mulai menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian dalam bidang pemerintahan sejak reformasi bergulir delapan tahun lalu, atas dasar itulah otonomi daerah dilaksanakan. Otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2002).

Tujuan otonomi daerah adalah memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Dengan berlakunya UU otonomi daerah sejumlah permasalahan timbul, seperti (Sutjipto Ngumar, 2002): (1) Reorganisasi unit-unit organisasi pada pemerintah daerah yang tidak lagi memerlukan penyeragaman seperti pada masa sebelumnya. Dengan demikian perlu dibentuknya atau dihilangkannya unit-unit organisasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini persaingan antar negara di berbagai bidang sangat ketat. Dalam bidang ekonomi masing-masing negara berupaya bebas antar negara yang telah dicantumkan dalam kesepakatan (WTO) tahun 2002 mengenai perdagangan. Untuk negara anggota harus tetap membuka pasar di setiap negara harus meningkatkan kualitas dipasaran untuk dapat bersaing dengan negara lain. Begitu pula dengan negara Indonesia. Masyarakat tidak mengabdikan adanya keterbukaan dan kemudahan dalam bidang pemerintahan sejak reformasi terjadi. Selain itu, saat ini pelaksanaan otonomi daerah dilakukan sebagai kewajiban yang diwajibkan kepada pemerintah dan masyarakatnya untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2002).

Otonomi daerah adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keadilan dan keberadilan dalam pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. (1) Reformasi ini-memiliki arti penting bagi masyarakat. Dengan demikian perlu dibantu atau dilibatkannya unit-unit organisasi/organisasi dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. (2) Penggabungan sumber-

sumber dana alternatif di luar skema pendanaan yang ada yang mungkin menimbulkan masalah baru, seperti yang mungkin akan terjadi di beberapa daerah yang hendak memungut retribusi atas pengambilan air dari daerah lain, retribusi atas sumber-sumber daya suatu daerah yang dipergunakan daerah lain (retribusi aliran sungai, retribusi pengambilan ikan, retribusi jalan daerah, dan sebagainya). (3) Masalah-masalah akuntabilitas, transparansi yang mewujudkan tuntutan reformasi sehingga diperlukan profesionalisasi dalam bidang *accounting* dan *budgeting* bagi pemerintah daerah yang sekarang ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Reformasi membawa banyak perubahan yang signifikan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dalam bidang keuangan. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting dari banyak pihak. Reformasi Keuangan Daerah telah memunculkan peraturan pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 yang diganti dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam peraturan pemerintah tersebut memuat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Masalah tersebut tidak akan terpisahkan dengan disiplin akuntansi yang berkaitan dengan pemerintahan, baik pemerintah pusat, propinsi, maupun daerah yaitu akuntansi sektor publik. Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang

pemberi dan penerima, di luar skema pertanggung jawaban yang ada yang merupakan
 tanggung jawab negara' pada seperti yang mungkin akan terjadi di beberapa
 daerah yang hendak membangun melalui cara pengumpulan dan dari daerah lain
 tersebut. Hal tersebut sangat penting bagi daerah yang ingin membangun daerah lain
 tersebut. Hal tersebut merupakan pengumpulan iuran, kontribusi jalan daerah dan
 sebagainya. (2) Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas
 merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu
 dan pemerintah perlu memperhatikan daerah yang sedang dan belum berkembang
 dilaksanakan.

pemerintah perlu memperhatikan berbagai pembangunan yang sedang berjalan
 pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dalam bidang kesehatan. Hal
 ini menjadi karena yang sangat penting dan banyak pihak. Kesehatan merupakan
 Dasar telah memunculkan Peraturan Pemerintah (PP) No 102 tahun 2000 yang
 mengatur dengan PP No 28 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan
 Penyelenggaraan Kesehatan Dasar dalam sistem kesehatan nasional dan
 termasuk perhatian dan penyelenggaraan kesehatan. Masalah tersebut tidak
 dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kesehatan.
 baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah yaitu administrasi sektor publik.
 Administrasi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyelenggaraan
 pelayanan publik, terutama yang bersifat keuangan dan lainnya yang
 berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang harus dan diperbaiki yang
 berdasarkan atas berbagai alternatif yang dilakukan pemerintah yang

dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota (Abdul Halim, 2002).

Dalam rangka memajukan wilayahnya, pemerintah membuat program-program yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan program tersebut tentu saja diperlukan anggaran. Rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Penyusunan anggaran ini dilakukan oleh badan eksekutif dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/RAPBD) kemudian diajukan kepada badan legislatif untuk dibahas bersama dan disetujui menghasilkan APBN/APBD.

Secara umum APBD merupakan gambaran keseluruhan perencanaan keuangan dan program kerja pemerintah daerah yang disusun secara sistematis dalam jangka waktu satu periode anggaran. Penyusunan anggaran memuat secara ringkas taksiran pencapaian sasaran yang dinyatakan secara kualitatif dalam jumlah nilai mata uang, baik berupa anggaran maupun belanja daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga dapat dikaitkan sebagai rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan kebijaksanaan yang telah diterapkan yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu periode anggaran. Rencana kerja yang dijabarkan dalam ukuran angka-angka

diperkirakan dapat mencapai de normalisasi dalam propinsi dan kabupaten...

(Agul Istim, 2002)

Dalam rangka memantapkan wifayahya pemerintahan kabupaten program-program yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan program tersebut maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk... (ABD) dan kegiatan pembangunan dan belajar (ABD) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan belajar (ABD) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan belajar (ABD)...

... dan ABID menunjukkan gambaran keseluruhan dan proses... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu...

... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu... dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu...

daerah dalam usaha melaksanakan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pada akhir tahun anggaran kepala daerah bertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagai lembaga legislatif dalam bentuk laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah yang akan dibahas DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD, ini berarti DPRD sebagai penanggung jawab terakhir atas pelaksanaan dalam lembaga pemerintahan daerah.

Mengingat pentingnya badan legislatif diperlukan ketelitian dan kejelian dalam membaca dan menyikapi setiap informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban eksekutif yang sebagian besar memuat informasi akuntansi keuangan daerah. Tentunya manfaat informasi akuntansi sangat mempengaruhi kinerja anggota legislatif untuk pengambilan keputusan organisasi dewan.

Selama ini kinerja legislatif belum sesuai dengan aspirasi rakyat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif saat ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia adalah kurangnya pemahaman mengenai informasi akuntansi terutama yang terkait dengan APBD. Kurangnya transparansi atau informasi mengenai kinerja finansial para anggota legislatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan APBD dapat menjadi contohnya. Zaki Baridwan dalam Harian Kedaulatan Rakyat tahun 2003 menyatakan pemerintah daerah harus mampu menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi

penjelasan mengenai keuangan daerah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah yang ada pada organisasi-organisasi pemerintah mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsinya secara baik dan benar, hal ini yang menjadi kendala bagi para anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi anggota legislatif akan manfaat informasi akuntansi mempengaruhi kinerja anggota legislatif tersebut maka penulis mengadakan penelitian pada anggota legislatif di kantor DPRD seluruh kabupaten/kota se propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang berpotensi besar untuk menjadi daerah maju karena mempunyai sumberdaya alam dan manusia yang cukup besar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENGARUH PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF AKAN MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF (Survei pada Kantor DPRD di Kabupaten/Kota**

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Penulis akan membatasi obyek penelitian pada anggota legislatif yang menjabat di Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Madya Yogyakarta.
2. Sampel penelitian ini terbatas hanya pada anggota legislatif yang menjabat sebagai anggota komisi periode 2004-2009.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Terdapat permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, agar lebih spesifik dan terarah dalam pembahasan hanya pokok masalah yang akan dianalisis secara mendalam. Pokok permasalahan tersebut adalah apakah persepsi anggota legislatif akan manfaat informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggota legislatif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulisan skripsi ini untuk mengetahui apakah persepsi anggota legislatif akan manfaat informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja

B. Rancangan Masalah Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang...

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan...

3. Ruang lingkup penelitian ini adalah...

4. Metode penelitian yang digunakan adalah...

5. Waktu penelitian ini adalah...

6. Lokasi penelitian ini adalah...

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh...

2. Apakah terdapat...

3. Bagaimana...

4. Apakah...

5. Bagaimana...

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui...

2. Untuk mengetahui...

3. Untuk mengetahui...

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat di bidang teoritis

- a Menambah wawasan penulis mengenai pentingnya manfaat informasi akuntansi sektor publik di badan legislatif.
- b Untuk membandingkan ilmu yang dipelajari dengan praktek nyata di lapangan.
- c Sebagai bahan pembendaharaan kata dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

2. Manfaat di bidang praktis

- a Memberikan gambaran secara jelas mengenai pengaruh persepsi anggota legislatif akan manfaat informasi akuntansi terhadap kinerja anggota legislatif.
- b Sebagai bahan introspeksi bagi instansi yang dijadikan objek penelitian apabila ada kekurangan yang harus diperbaiki

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui di bidang penelitian

- a. Mengetahui apakah benar-benar penelitian yang dilakukan ini benar-benar
- b. Untuk mengetahui apakah benar-benar penelitian yang dilakukan ini benar-benar
- c. Untuk mengetahui apakah benar-benar penelitian yang dilakukan ini benar-benar

2. Manfaat di bidang penelitian

- a. Mengetahui gambaran secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan ini
- b. Sebagai bahan untuk mengetahui apakah benar-benar penelitian yang dilakukan ini benar-benar